



Sintang Siap Jalankan Elektronik Audit

SINTANG—Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat kerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalbar dalam hal pemeriksaan penggunaan keuangan pada tahun 2014 mendatang. Kerjasama tersebut termuat dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Bupati Sintang Milton Crosby dengan Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo di Auditorium BPK RI pada Senin, 29 Juli 2013. Penandatanganan MoU tersebut bersamaan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat.

Bupati Sintang Milton Crosby yang ditunjuk mewakili Bupati se Kalbar menyampaikan, elektronik audit memang penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang saat ini terus dilaksanakan. "Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang sudah tanpa pamrih membantu pemda dalam mewujudkan penggunaan dan laporan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ini

akan memotivasi kita untuk ke depan lebih baik. Kita akan tindak lanjut bersama-sama sehingga ke depannya pelaporan akan lebih cepat dan mudah. Staf kami tentu ke depan akan banyak bertanya dan koordinasi ke BPK karena elektronik audit ini hal yang baru," kata Bupati.

"Terkait dengan elektronik audit ini, saya berpendapat petugas kami di kabupaten kota memang harus di perkuat sehingga sistem ini bisa berjalan dengan baik. Tentu kami akan segera melakukan persiapan dan rapat dengan staf yang mengurus keuangan sehingga setiap kabupaten siap menjalankan elektronik audit ini. Kami juga senang keamanan sistem elektronik audit sangat baik sehingga kerahasiaan itu bisa dijamin," tambah Milton.

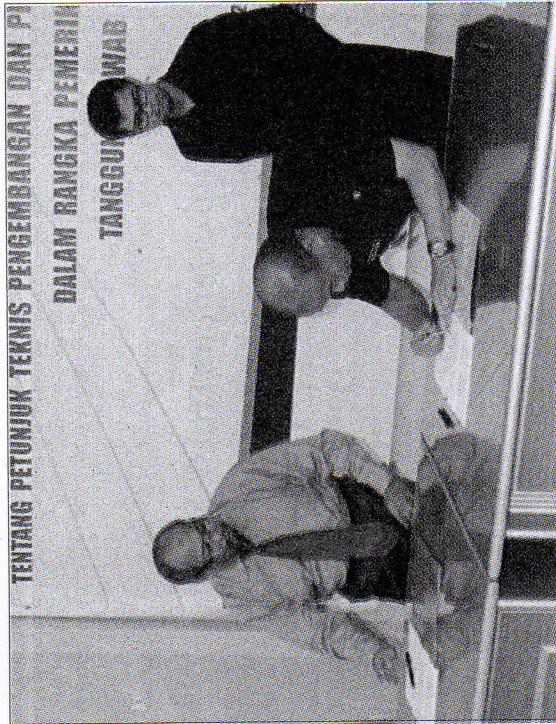
Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo menjelaskan, penandatanganan keputusan bersama Kepala Perwakilan Propinsi Kalbar BPK RI dan kepala daerah pemerintah Kabupaten/kota di Kalbar

tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah tersebut dalam rangka menuju BPK sinergi.

"Pada tahun 2011 yang lalu, kita tandatangi MoU elektronik audit. Tanpa MoU ini pun sebenarnya kami memiliki wewenang untuk mendapatkan data. Tetapi juknis mendapatkan data secara elektronik sangat penting di lakukan," kata Adi.

Menurut Edi, elektronik audit merupakan pendukung pilar dalam reformasi birokrasi. Elektronik audit merupakan sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem internal BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan melalui sebuah komunikasi data secara online. Dalam sistem ini siapa saja bisa melihat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

◆ Ke Halaman 27 kolom 5



SUTAMIPONTIANAK POST
KESEPAKATAN: Bupati Sintang Milton Crosby mendatangi kesepakatan kerja sama dengan BPK RI tentang realisasi elektronik audit.

Sintang Siap Jalankan Elektronik Audit

Sambungan dari halaman 28

beban kerja. Meskipun melalui internet, sistem ini sangat aman karena sudah bekerjasama dengan Lembaga sandi negara dalam menguji keamanannya. Juga ada kode etik dalam BPK RI. Elektronik audit ini akan memperce-

pat proses pemeriksaan dan audit akan memudahkan pemda dalam menyediakan data terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Tindak lanjut juga dilakukan secara online dari pemda melalui jaringan internet. (stm)

Adi Sudibyo menambahkan perlu adanya kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi setiap pemda. Elektronik audit tidak membebani pemda dari segi penganggaran dan